

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia  
2021**



**BUPATI TAPIN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TAPIN**  
**NOMOR 188.45/ 185 /KUM/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN TAPIN**  
**TAHUN 2021**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
23. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 304);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 080 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 80);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
42. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

43. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 60);
44. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 27);
45. Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam:

- |              |   |
|--------------|---|
| Lampiran I   | : Dinas Pendidikan                                    |
| Lampiran II  | : Dinas Kesehatan                                     |
| Lampiran III | : RSUD Datu Sanggul                                   |
| Lampiran IV  | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang             |
| Lampiran V   | : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |

Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Tenaga Kerja
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lampiran XV	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVI	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XVIII	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Lampiran XIX	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XX	: Dinas Pemuda dan Olahraga
Lampiran XXI	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Lampiran XXII	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXIII	: Dinas Perikanan
Lampiran XXIV	: Dinas Pertanian
Lampiran XXV	: Dinas Perdagangan

Lampiran	XXVI	: Dinas Perindustrian
Lampiran	XXVII	: Sekretariat Daerah
Lampiran	XXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran	XXIX	: Kecamatan Piani
Lampiran	XXX	: Kecamatan Lokpaikat
Lampiran	XXXI	: Kecamatan Tapin Utara
Lampiran	XXXII	: Kecamatan Bakarangan
Lampiran	XXXIII	: Kecamatan Candi Laras Selatan
Lampiran	XXXIV	: Kecamatan Candi Laras Utara
Lampiran	XXXV	: Kecamatan Hatungun
Lampiran	XXXVI	: Kecamatan Salam Babaris
Lampiran	XXXVII	: Kecamatan Tapin Tengah
Lampiran	XXXVIII	: Kecamatan Tapin Selatan
Lampiran	XXXIX	: Kecamatan Binuang
Lampiran	XL	: Kecamatan Bungur
Lampiran	XLI	: Inspektorat
Lampiran	XLII	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Lampiran	XLIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran	XLIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran	XLV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
  - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - d. Penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI TAPIN.



M. ARIFIN ARPAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
3. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

**PERUBAHAN RENCANA  
KERJA  
SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**Badan Kepegawaian Dan  
Pengembangan  
Sumber Daya Manusia**  
2021



# KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji kita sembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dapat diwujudkan.

Dengan selesainya Rencana Kerja ini diharapkan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran kegiatan pada tahun 2021 bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya secara baik dan benar (good Governance) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada Bupati Tapin dan masyarakat.

Materi yang terkandung dalam Rencana Kerja ini selain merupakan pedoman/arah anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, juga memuat hasil dari kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM pada tahun 2020, dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan serta aspek anggaran yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat program.

Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaannya di masa mendatang.

Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini, baik yang secara aktif terlibat langsung dalam penyusunannya, maupun narasumber yang mendukung kesempurnaan Rencana Kerja ini. Dan kami mengharapkan, semoga Rencana Kerja ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin.

Rantau, Juli 2021  
Kepala BKPSDM Kabupaten Tapin,

Drs. H. SYAIFUL BAHRIN NOOR  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 19630419 198503 1 007



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapin dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pembangunan Kabupaten Tapin lima sampai sepuluh tahun kedepan adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten **Tapin Mandiri dan Sejahtera Yang Agamis**. yakni sebuah kabupaten yang kehidupan masyarakatnya selalu diwarnai dengan nilai-nilai agamis yang dipegang teguh dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dalam interaksi sosial sehari-hari.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Namun sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan

keadaan, maka diperlukan adanya perubahan atas RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2021.

Perubahan atas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimungkinkan oleh ketentuan dalam pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Oleh karena penyusunan Renja SKPD dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD maka perubahan atas dokumen RKPD dapat menjadi acuan sekaligus berangkat dari Perubahan Renja SKPD. Rancangan perubahan RKPD dan rancangan perubahan Renja SKPD yang disusun masing-masing dapat memberikan masukan satu sama lain.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin di bidang kepegawaian, maka dengan sendirinya BKPSDM mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses kepegawaian Kabupaten Tapin dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga dapat mengarah pada visi, misi Kabupaten Tapin seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Untuk mencapai strategi tersebut Badan Kepegawaian Daerah dituntut mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku selama satu tahunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dari rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Tapin adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabuapten Tapin Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan atas PP Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten Tapin Tahun 2013-2017
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini adalah sebagai pedoman arah pelaksanaan kegiatan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara program daerah, program provinsi dan program nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan rancangan perubahan rencana kerja tahun 2021 yaitu :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Renstra BKPSDM.
2. Agar program/ kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
4. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.
5. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rancangan Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- I. Pendahuluan yang terdiri dari :
  - I.1 Latar Belakang
  - I.2 Landasan Hukum
  - I.3 Maksud dan Tujuan
  - I.4 Sistematika Penulisan
  
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Tapin yang terdiri dari
  - II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.
  
- III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD
  
- IV. Penutup.

## BAB II

### FORMAT I.H

EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

KABUPATEN TAPIN

Nama SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
									Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9 = (5+7)*	10 = (9/4)*
1	20	01		<b>Program Pelayanan Adm Perkantoran</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	85,71	100	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	135,7	<b>135,71</b>
1	20	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa telpon, air dan listrik (bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00
1	20	1	7	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	Tersedianya administrasi Keuangan (bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00
1	20	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan dan peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan dan peralatan kerja(bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00
1	20	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00

1	20	1	11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00
1	20	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor (paket)	10	5	2	1	50,00	6	60,00
1	20	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan (bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00
1	20	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi (bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00
1	20	1	19	Perjalanan Dinas	Terlaksananya perjalanan dinas untuk rapat koor-dinasi, konsultasi, sosia-lisasi (bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00
1	20	1	24	Tapin Expo	Terlaksananya Tapin Expo (kali)	5	3	1	0	0,00	3	60,00
1	20	1	25	Penyelesaian Laporan E-Audit	Tersedianya laporan E-Audit (laporan)	36	12	12	6	50,00	18	50,00
1	20	1	26	Pembuatan Buku Profil PNS 2015	Jumlah buku profil PNS 2015 (buah)	600	315	120	60	50,00	375	62,50
1	20	1	27	Pemutakhiran data PNS	Tersedianya data-data yang termutakhir(bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00
1	20	1	28	Perbaikan data PNS dan Penyelesaian Konversi	Tersedianya data & NIP baru (bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00



				NIP Baru								
1	20	01	29	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor(bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00
1	20	1	30	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Tersedianya laporan barang milik daerah yang akurat & uptodate (laporan)	24	12	6	1	16,67	13	54,17
1	20	1	31	Pengelolaan Data PNS	Tersedianya data kepegawaian (bulan)	12	12	0	0	0,00	12	100,00
1	20	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100</b>	100	100	<b>50</b>	<b>50,00</b>	150,0	<b>150,00</b>
1	20	2	21	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya mebeleur(paket)	1	1	0	<b>0</b>	<b>0,00</b>	1	<b>100</b>
1	20	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung kantor (bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00
1	20	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas(bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00
1	20	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	Terpeliharanya perlengkapan	60	36	12	6	50,00	42	70,00

				kantor	kantor(bulan)								
1	20	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor(bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00	
1	20	2	35	Pemeliharaan SIMPEG/SAPK	Terpeliharanya perangkat SAPK (bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00	
1	20	2	36	Pengadaan SAPK	Tersedianya perangkat SAPK (paket)	1	1	0	0	0,00	1	100	
1	20	2	45	Rehab Gedung Diklat	Terpeliharanya Gedung Diklat (paket)	3	1	1	1	100,00	2	66,67	
1	20	2	61	Pengadaan SIMPEG Online	Tersedianya software SIMPEG Online (paket)	1	1	0	0	0,00	1	100	
1	20	2	62	Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Formasi Online Kabuapten Tapin (SIMFON-Tapin)	Tersedianya data formasi online (kali)	1	0	0	0	0,00	0	0,00	
1	20	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Prosentase Jumlah laporan capaian kinerja dan laporan keuangan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50,00</b>	<b>150</b>	<b>150,00</b>	

1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	output : Jumlah Laporan bulanan (laporan)	50	27	10	8	80	35	70,00
1	20	06	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan	output : Jumlah Laporan keuangan (laporan)	5	3	1	1	100,00	4	80,00
1	20	28		<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>Prosentase aparatur pemerintah daerah yang berkualifikasi minimal S1</b>	<b>60</b>	41,41	50	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	41,4	<b>69,02</b>
					<b>Prosentase pejabat eselon II yang minimal ber-pendidikan minimal S2</b>	<b>80</b>	75	77				
1	20	28	1	Diklat Prajabatan	Terlaksananya Diklat Prajabatan (orang)	670	421	60	23	38,33	444	66,27
1	20	28	2	Diklatpim IV	Terlaksananya Diklatpim IV(orang)	200	41	40	40	100,00	81	40,50
1	20	28	3	Diklatpim III	Terlaksananya Diklatpim III (orang)	88	10	20	10	50,00	20	22,73
1	20	28	4	Diklatpim II	Terlaksananya Diklatpim II (orang)	25	3	10	3	30,00	6	24,00
1	20	28	5	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	PNS yg menerima bantuan tugas belajar	11	9	2	0	0,00	9	81,82

					dan ikatan dinas(orang)							
1	20	29		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	Prosentase aparatur pemerintah daerah yang berkualifikasi minimal S1	60	41,41	50	0	0,00	41,41	69,02
					Prosentase pejabat eselon II yang minimal berpendidikan minimal S2	80	75	77	0	0,00	75	93,75
					Prosentase penurunan pelanggaran disiplin oleh PNS	70	-300	60	0	0,00	-300	-428,57
					a.Prosentase Jumlah PNS yang mengajukan ijin cuti dan memperoleh ijin cuti tepat waktu	100	100	100	50	50,00	150	150,00
					b.Prosentase Jumlah CPNS yang mengajukan usul PNS dan diangkat menjadi PNS serta melaksanakan sumpah janji tepat waktu	100	100	100	50	50,00	150	150,00
					c. Prosentase jumlah PNS yang mengajukan usul kenaikan pangkat dan menerima SK Kenaikan Pangkat tepat waktu	99	97,51	98	0	0,00	97,51	98,49

					d.Prosentase jumlah PNS yang mengajukan usul kenaikan gaji berkala dan menerima SK Gaji Berkala tepat waktu	100	100	100	50	50,00	150	150,00
					e.Prosentase jumlah PNS yang mengajukan usul Pensiun dan menerima SK Pensiun tepat waktu	100	100	100	50	50,00	150	150,00
					Prosentase jumlah kepuasan pelayanan pembuatan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, usul PNS 100%, ijin belajar dan tugas belajar	98	-	95	0	0,00	0	0,00
					Prosentase PNS eselon IV ke atas yang memenuhi standar kompetensi	99	98,29	99	0	0,00	98,29	99,28
					Prosentase akurasi data yang dapat ditingkatkan	99	97,19	98	0	0,00	97,19	98,17
1	20	29	1	Penyelesaian administrasi Ijin Belajar dan Tugas Belajar	Terbitnya Surat Ijin Belajar & Tugas Belajar (SK)	650	371	100	35	35	406	62,46
1	20	29	2	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan Satya Lencana (penghargaan)	550	447	110	0	0,00	447	81,27

1	20	29	3	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin/kegiatan Tim MP2HD	Terlaksananya proses penanganan pelanggaran disiplin(rapat)	100	38	20	5	25	43	43,00
1	20	29	4	Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Terlaksananya penerimaan Praja IPDN(kali)	5	2	1	0	0,00	2	40,00
1	20	29	5	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	Terlaksananya pelantikan /pengambilan sumpah jabatan (kali)	20	8	4	1	25,00	9	45,00
1	20	29	6	Pengambilan sumpah PNS	Terlaksananya pengambilan sumpah CPNS yang telah menjadi PNS (kali)	5	3	1	0	0	3	60,00
1	20	29	7	Kegiatan Baperjakat	Terlaksananya kegiatan rapat baperjakat (kali)	120	63	24	9	37,50	72	60,00
1	20	29	8	Seleksi penerimaan CPNS	Terlaksananya penerimaan CPNSD (kali)	5	2	1	0	0,00	2	40,00
1	20	29	9	Penyelesaian kenaikan pangkat PNS	Terbitnya SK pangkat PNS tepat waktu (SK)	5000	2589	1000	271	27,10	2860	57,20
1	20	29	10	Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala	Terlaksananya kenaikan gaji berkala(SK)	5000	3109	1000	631	63,10	3740	74,80
1	20	29	11	Pembekalan CPNS Daerah	Terlaksananya pembekalan CPNSD(kali)	5	4	1	0	0	4	80,00

1	20	29	12	Penyelesaian SK Mutasi	Terbitnya SK mutasi PNS(SK)	750	314	150	59	39	373	49,73
1	20	29	13	Ujian Dinas Tk.ITk.II dan UKPPI	Terlaksananya ujian dinas Tk.I/Tk.II dan UKPPI (kali)	10	6	2	1	50	7	70,00
1	20	29	14	Penyusunan Bezetting/formasi CPNS/PNS	Terlaksananya penyusunan Formasi PNS Daerah(bulan)	60	36	12	6	50	42	70,00
1	20	29	15	Penetapan CPNS menjadi PNS	Terbitnya SK PNS tepat waktu(paket)	5	3	1	0	0	3	60,00
1	20	29	16	Peninjauan/Perbaikan Masa Kerja PNS	Terlaksananya Peninjauan masa kerja PNS(bulan)	60	36	12	6	50	42	70,00
1	20	29	17	Penyelesaian SK Pensiun	Terbitnya SK Pensiun tepat waktu (SK)	470	300	75	55	73	355	75,53
1	20	29	18	Penyelesaian Proses Pembuatan Karpeg, Karis/karsu, Taspen	Terlaksananya proses pembuatan karpeg, karis/karsu, taspen dengan cepat(buah)	1500	1050	300	436	145	1486	99,07
1	20	29	19	Penyelesaian Proses Pembuatan SK Jabatan Fungsional	Terbitnya SK Jafung tepat waktu (SK)	1500	900	200	377	189	1277	85,13
1	20	29	20	Proses Penyelesaian Pembuatan Cuti-cuti PNS	Terbitnya surat cuti PNS(surat)	1375	830	275	148	54	978	71,13
1	20	29	21	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Terlaksananya Rakor (kali)	6	2	2	0	0	2	33,33

1	20	29	22	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terlaksananya Studi Banding (kali)	1	1	0	0	0	1	100
1	20	29	23	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terlaksananya test kompetensi jabatan (bln)	24	0	12				
1	20	29	24	Pemetaan Potensi & Kompetensi Bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemkab Tapin	Terlaksananya test pemetaan kompetensi (kali)	1	0	0	0	0	0	0,00
1	20	29	25	Pelaksanaan e-PUPNS	Terlaksananya e-PUPNS (kali)	1	1	0	0	0	1	100
1	20	29	26	Bimtek SAPK	Terlaksananya Bimtek SAPK(kali)	1	1	0	0	0	1	100
1	20	30		<b>Program Peningkatan Kapasitas SDM</b>	<b>Persentase Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>50</b>	<b>50</b>	150	<b>150,00</b>
1	20	30	1	Updating Data SAPK	Data yang update dan akurat(bulan)	60	36	12	6	50,00	42	70,00
1	20	30	2	Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	Terlaksananya diklat teknis dan fungsional(orang)	500	369	100	177	177,00	546	109,20
1	20	30	3	Sosialisasi Ke Taspenan	Terlaksananya sosialisasi (kali)	4	2	2	0	0	2	50,00



1	20	30	4	Diklat Pranata Komputer	Terlaksananya Diklat (kali)	3	1	2	2	100	3	100
1	20	30	5	Operasional SIMPEG	Terlaksananya SIMPEG (bln)	24	0	12	6	50	6	25
1	20	30	6	Bimtek Jabatan Fungsional	Terlaksananya Bimtek Jafung (kali)	2	0	2	0	0	0	0
1	20	30	7	Diklat Analisis Kepegawaian	Terlaksananya Diklat Analisis Kepegawaian	2	0	1	2	200	2	100
1	20	30	8	Diklat Pengadaan Barang & Jasa	Terlaksananya Diklat (kali)	1	1	0	0	0	1	100
1	20	30	9	Diklat Penatausahaan Aset	Terlaksananya Diklat (kali)	1	1	0	0	0	1	100
1	20	30	10	Bimtek Penilaian Prestasi Kerja PNS	Terlaksananya Bimtek Penilaian Prestasi Kerja PNS(kali)	2	2	0	0	0,00	2	100
1	20	30	11	Pendidikan D3 Akuntansi	Terlaksananya pendidikan D3 Akuntansi(paket)	1	1	0	0	0,00	1	100

Sumber : Data diolah dari Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD BKD s/d Triwulan II Tahun 2016

Berdasarkan data hasil evaluasi Renja BKPSDM sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sebagian besar terlaksana sesuai dengan Output (keluaran) dari kegiatan yang telah ditetapkan dan jika dilihat dari sisi serapan anggaran dan realisasi kinerja renja sampai dengan triwulan II ada beberapa kegiatan yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya namun hal tersebut lebih dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yg baru akan dilaksanakan setelah Triwulan II pada tahun berjalan sesuai dengan perencanaan yg telah disusun oleh pelaksana kegiatan.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin maka BKPSDM Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan wajib Pemerintahan. Tugas yang diberikan adalah dalam rangka untuk terbinanya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan *good governance*.

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-SKPD**

Tujuan Renja-SKPD BKPSDM Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran BKPSDM**  
**Kabupaten Tapin**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN		
			2021	Akhir periode	
Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Tapin	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Seleksi CASN	Nilai Indeks Kepuasan Pelamar terhadap penyelenggaraan Seleksi CASN	90	90	
	Meningkatnya ASN Berkualitas dan Kompeten		Nilai Indeks Profesionalitas ASN	75	75
			Perserntase Pejabat Struktural yang lulus diklat jabatannya	50%	50%
			Persentase ASN Fungsional yang lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	80%	80%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2021	Akhir periode
	Meningkatnya Kualifikasi Pejabat Struktural yang sesuai kompetensinya	Persentase Jabatan Struktural yang terisi oleh Pejabat yang sesuai kompetensinya	90%	90%
		Persentase Pegawai yang berkinerja tinggi	100%	100%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 beserta prognosisnya dapat dilihat pada **Lampiran III.3**.



TOTAL

2646488526 | 3718439763 | 1071951237



\_\_\_\_\_



Nama SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Pro gram/Kegi atan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok
					Sebelum	Sesudah	Sebelum
1				2	3	4	5
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
4	5			Kepegawaian			
4	5	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	
4	5	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, dan Listrik
4	5	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu tersedianya alat tulis kantor	Waktu tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK dengan baik

4	5	1	11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan baik
4	5	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu ketersediaan konsumsi	Waktu ketersediaan konsumsi	Tersedianya makanan dan minuman dengan baik
4	5	1	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi (perjalanan dinas)	Waktu pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi (perjalanan dinas)	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi / perjalanan dinas dengan baik
4	5	1	19	Tapin Expo	Jumlah ketersediaan Stan BKPSDM pada Tapin expo	Jumlah ketersediaan Stan BKPSDM pada Tapin expo	Tersedianya stand BKPSDM Kab. Tapin pada Tapin EXPO tahun 2020
4	5	1	20	Belanja Jasa Petugas Keamanan dan Kebersihan	Waktu ketersediaan Petugas Keamanan dan Kebersihan BKPSDM Kab. Tapin	Waktu ketersediaan Petugas Keamanan dan Kebersihan BKPSDM Kab. Tapin	Petugas Keamanan dan Kebersihan BKPSDM Kab. Tapin
4	5	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik	

4	5	2	11	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	Peralatan Kantor BKPSDM Kab. Tapin
4	5	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kendaraan Dinas BKPSDM Kab. Tapin
4	5	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Waktu ketersediaan pemeliharaan peralatan kantor	Waktu ketersediaan pemeliharaan peralatan kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dengan baik
4	5	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu ketersediaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Waktu ketersediaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor dengan baik
4	5	2	45	Sertifikat Tanah	Jumlah sertifikat tanah milik Daerah (Aset BKPSDM Kab. Tapin) yang diterbitkan	Jumlah sertifikat tanah milik Daerah (Aset BKPSDM Kab. Tapin) yang diterbitkan	

4	5	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	
4	5	6	5	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan dengan baik
4	5	6	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang wajib dibuat	Jumlah laporan yang wajib dibuat	Jumlah Laporan yang diselesaikan
4	5	15		Program Kinerja, Pengembangan karier dan Disiplin Aparatur	Persentase Pejabat pemimpin tinggi berdasarkan hasil assessment Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan	Persentase Pejabat pemimpin tinggi berdasarkan hasil assessment Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan	
					Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan	Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan	

4	5	15	7	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi	Jumlah Pelaksanaan Pemberian penghargaan bagi PNS yang Berprestasi di Kabupaten Tapin	Jumlah Pelaksanaan Pemberian penghargaan bagi PNS yang Berprestasi di Kabupaten Tapin	ASN Kab. Tapin
4	5	15	8	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin/kegiatan Tim MP2HD	Waktu pelaksanaan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	Waktu pelaksanaan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	ASN Kab. Tapin
4	5	15	9	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	Waktu pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan	Waktu pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan	ASN Kab. Tapin
4	5	15	10	Pengambilan sumpah PNS	Waktu pelaksanaan pengambilan sumpah PNS	Waktu pelaksanaan pengambilan sumpah PNS	CASN Kab. Tapin
4	5	15	11	Kegiatan Baperjakat	Waktu pelaksanaan kegiatan baperjakat	Waktu pelaksanaan kegiatan baperjakat	ASN Kab. Tapin
4	5	15	12	Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Waktu Penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama	Waktu Penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama	ASN Kab. Tapin

4	5	15	13	Penyelesaian Proses Pembuatan Karpeg, Karis/karsu, Taspen	Waktu Penyelesaian proses pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen	Waktu Penyelesaian proses pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen	ASN Kab. Tapin
4	5	15	14	Penyelesaian Proses Pembuatan SK Jabatan Fungsional	Waktu Penyelesaian proses pembuatan SK Jafung	Waktu Penyelesaian proses pembuatan SK Jafung	ASN Kab. Tapin
4	5	15	15	Proses Penyelesaian Pembuatan Cuti-cuti PNS	Waktu penyelesaian pembuatan cuti-cuti PNS	Waktu penyelesaian pembuatan cuti-cuti PNS	ASN Kab. Tapin
4	5	15	17	Evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur	Waktu pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur	Waktu pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur	ASN Kab. Tapin
4	5	15	22	Kegiatan Pencantuman Gelar	Waktu pelaksanaan pencantuman gelar	Waktu pelaksanaan pencantuman gelar	ASN Kab. Tapin
4	5	15	23	Pelaksanaan Apel Hari Kesadaran Nasional	Waktu pelaksanaan apel hari kesadaran Nasional	Waktu pelaksanaan apel hari kesadaran Nasional	ASN Kab. Tapin

				Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil		Waktu Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil	
4	5	15	25				
				Program Peningkatan Kapasitas SDM	Persentase Pejabat pemimpin tinggi berdasarkan hasil assessment	Persentase Pejabat pemimpin tinggi berdasarkan hasil assessment	
4	5	16			Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan	Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan	
					Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan	Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan	
				Penyelenggaraan test kompetensi jabatan	Waktu pelaksanaan tes kompetensi jabatan	Waktu pelaksanaan tes kompetensi jabatan	ASN Kab. Tapin
4	5	16	2				
				Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	Waktu pelaksanaan Diklat teknis dan fungsional	Waktu pelaksanaan Diklat teknis dan fungsional	ASN Kab. Tapin
4	5	16	3				
				Diklat Prajabatan	jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	CASN Kab. Tapin
4	5	16	4				

4	5	16	5	Diklatpim IV	Jumlah peserta PNS yang mengikuti Diklatpim IV	Jumlah peserta PNS yang mengikuti Diklatpim IV	ASN Eselon IV Kab. Tapin
4	5	16	6	Diklatpim III	Jumlah peserta PNS yang mengikuti Diklatpim III	Jumlah peserta PNS yang mengikuti Diklatpim III	ASN Eselon III Kab. Tapin
4	5	16	7	Diklatpim II	Jumlah peserta PNS yang mengikuti Diklatpim II	Jumlah peserta PNS yang mengikuti Diklatpim II	ASN Eselon II Kab. Tapin
4	5	16	8	Penyelesaian administrasi Ijin Belajar dan Tugas Belajar	Waktu penyelesaian administrasi izin belajar dan tugas belajar	Waktu penyelesaian administrasi izin belajar dan tugas belajar	ASN Kab. Tapin
4	5	17		Program Pengelolaan dan Informasi Kepegawaian	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	
4	5	17	8	Seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN	Waktu Seleksi penerimaan calon pegawai ASN	Waktu Seleksi penerimaan calon pegawai ASN	Pelamar CASN Kab. Tapin



4	5	17	9	Penyelesaian kenaikan pangkat PNS	Jumlah terbitnya SK pangkat PNS	Jumlah terbitnya SK pangkat PNS	ASN Kab. Tapin
4	5	17	11	Pembekalan Calon Pegawai ASN	waktu Pembekalan calon pegawai ASN	waktu Pembekalan calon pegawai ASN	CASN Kab. Tapin
4	5	17	12	Penyelesaian SK Mutasi	Waktu penyelesaian SK Mutasi	Waktu penyelesaian SK Mutasi	ASN Kab. Tapin
4	5	17	13	Ujian Dinas Tk.I Tk.II dan UKPPI	Waktu pelaksanaan Ujian dinas Tk.I Tk.II dan UKPPI	Waktu pelaksanaan Ujian dinas Tk.I Tk.II dan UKPPI	ASN Kab. Tapin
4	5	17	14	Pengolahan Data Bezetting Existing ASN	Waktu pengolahan data bezetting existing ASN	Waktu pengolahan data bezetting existing ASN	ASN Kab. Tapin
4	5	17	15	Penetapan CPNS menjadi PNS	Waktu Penetapan CPNS menjadi PNS	Waktu Penetapan CPNS menjadi PNS	CASN Kab. Tapin
4	5	17	16	Peninjauan/Perbaikan Masa Kerja PNS	Waktu Peninjauan / perbaikan masa kerja PNS	Waktu Peninjauan / perbaikan masa kerja PNS	ASN Kab. Tapin

4	5	17	17	Penyelesaian SK Pensiun	Waktu penyelesaian SK pensiun	Waktu penyelesaian SK pensiun	Waktu penyelesaian SK Pensiun
4	5	17	18	Sistem Informasi Berkala Online	Waktu penyelesaian SK berkala	Waktu penyelesaian SK berkala	ASN Kab. Tapin
4	5	17	19	Entry Data dan Pengelolaan Kearsipan	waktu pelaksanaan entry data dan pengelolaan kearsipan	waktu pelaksanaan entry data dan pengelolaan kearsipan	Waktu pelaksanaan entry data ASN dan Pengelolaan Kearsipan
4	5	17	20	Pengelolaan dan Pengembangan Website	Waktu pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan website	Waktu pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan website	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan website dengan baik
4	5	17	21	Perbaikan Data Pegawai dan Operasional SAPK	Waktu perbaikan data pegawai dan operasional SAPK	Waktu perbaikan data pegawai dan operasional SAPK	Data ASN Kab. Tapin
4	5	17	22	Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG	Waktu pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SIMPEG	Waktu pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SIMPEG	Manajemen Data ASN Kab. Tapin
<b>TOTAL</b>							

**ANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2021  
KABUPATEN TAPIN**

Rencana Tahun 2021							
c Sasaran	Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif		
	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)
6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-11
			100%	100%	1026885493	920145020	-106740473
Waktu penyediaan jasa komunikasi, dan Listrik	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	72000000	72000000	0
Tersedianya kebutuhan ATK dengan baik	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	106136730	107252745	1116015

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan baik	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	10000000	22500000	12500000
Tersedianya makanan dan minuman dengan baik	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	69000000	97100000	28100000
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi / perjalanan dinas dengan baik	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	688548763	563692275	-124856488
Tersedianya stand BKPSDM Kab. Tapin pada Tapin EXPO tahun 2020	TAPIN	TAPIN	1 kali	1 kali	23600000	0	-23600000
Petugas Keamanan dan Kebersihan BKPSDM Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	57600000	57600000	0
			100%	100%	140251000	741042710	600791710

Peralatan Kantor BKPSDM Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	6 Buah	6 Buah	34851000	601451000	566600000
Kendaraan Dinas BKPSDM Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	1 Buah	1 Buah	27200000	27200000	0
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dengan baik	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	43200000	60300000	17100000
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor dengan baik	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	35000000	47091710	12091710
Aset Tanah BKPSDM Tapin		BKPSDM Tapin	1 Sertifikat	1 Sertifikat		5000000	5000000

			100%	100%	15000000	28500000	13500000
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan dengan baik	TAPIN	TAPIN	1 Laporan	1 Laporan	7500000	16500000	9000000
Jumlah Laporan yang diselesaikan	TAPIN	TAPIN	10 Laporan	10 Laporan	7500000	12000000	4500000
			90%	90%			
			90%	90%			
			90%	90%	418270000	426270000	8000000

ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	1 kali	1 kali	6070000	6070000	0
ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	13100000	13100000	0
ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	50000000	58000000	8000000
CASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	10250000	10250000	0
ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	26900000	7100000	-19800000
ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	276250000	276250000	0

ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	450000	450000	0
ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	450000	450000	0
ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	500000	500000	0
ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	23200000	23200000	0
ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	450000	450000	0
ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	10650000	10650000	0



ASN		Tapin		12 bulan		19800000	19800000
			%	%			
			%	%			
			75%	75%	649583633	1124583633	475000000
ASN Kab. Tapin	INDONESIA	INDONESIA	12 Bulan	12 Bulan	454622633	454622633	0
ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	120000000	120000000	0
CASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	70 Orang	70 Orang	0	475000000	475000000

ASN Esselon IV Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	0 Orang	0 Orang	0	0	0
ASN Esselon III Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	2 Orang	2 Orang	44250000	44250000	0
ASN Eselon II Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	1 Orang	1 Orang	30261000	30261000	0
ASN Kab. Tapin	INDONESIA	INDONESIA	12 Bulan	12 Bulan	450000	450000	0
			99%	99%	396498400	477898400	81400000
Pelamar CASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	248800000	244800000	-4000000

ASN Kab. Tapin	KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	1000 SK	1000 SK	57100000	57100000	0
CASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	9270000	9270000	0
ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	450000	450000	0
ASN Kab. Tapin	KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	20000000	20000000	0
ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	450000	450000	0
CASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	450000	450000	0
ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	450000	450000	0

Waktu penyelesaian SK Pensiun	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	14380000	14380000	0
ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	998400	998400	0
Waktu pelaksanaan entry data ASN dan Pengelolaan Kearsipan	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	3000000	3000000	0
Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan website dengan baik	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	33500000	33500000	0
Data ASN Kab. Tapin	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	12 Bulan	12 Bulan	450000	450000	0
Manajemen Data ASN Kab. Tapin	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	7200000	92600000	85400000
					<b>2.646E+09</b>	<b>3.718E+09</b>	<b>1.072E+09</b>

Sumber Dana		Perkiraan Maju Tahun 2022		Jenis Keg	SKPD Penanggungjawab
Sebelum	Sesudah	Target Capaian	Pagu Indikatif	a/b/c	2/1/2003
14	15	16	17	18	19
			1.0122E+10		
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		79200000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		117978019.5		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		24750000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		106810000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		620061502.5		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		63360000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			8151469810		

Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		661596100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		29920000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		66330000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		51800881		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	1 Sertifikat	5500000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

			31350000		
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		18150000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		13200000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			4688970000		



Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		6677000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		14410000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		63800000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		11275000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		7810000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		303875000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		495000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		495000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		550000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		25520000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		495000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		11715000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	12 bulan	21780000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			1.237E+10		
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		500084896.3		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)			132000000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		522500000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		48675000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		33287100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		495000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			5256882400		
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		269280000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		62810000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		10197000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		495000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		22000000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		495000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		495000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		495000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		15818000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		1098240		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		3300000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		36850000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		495000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		101860000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang juga merupakan pelaksanaan tahun ke 3 (tiga) dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin tahun 2018-2023.

Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya guna tercapainya tujuan, sasaran, program-program pembangunan yang berpedoman terhadap RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 serta mengacu kepada renstra SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Pelaksanaan kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi mensyaratkan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antar SKPD dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD tersebut

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Tapin tahun 2021 ini, kiranya dapat memberi arah, acuan dan pedoman bagi kegiatan – kegiatan BKPSDM, sehingga Visi, Misi, dan tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

**BUPATI TAPIN,**

**M. ARIFIN ARPAN**